

Analisis Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat)

Roisatul Aminy¹, Endar Pituringsih², Erna Widiastuty³

^{1,2,3}Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram

Abstract

The aims of this research is to find empirical evidence of the influence of good governance, accounting standards of government and agency accounting systems on the quality of the financial statements at the General Election Commission (KPU) in NTB. The unit of analysis used in this study is the entity, so that the population in this study is the whole members/staffs who are directly involved in the preparation of financial statements as many as 100 respondents. Processing data using Partial Least Square (PLS) with the analysis of second order confirmatory. The results showed that the quality of financial reporting is affected by the application of accounting standards and accounting system of government agencies, but is not affected by the application of good governance. The implications of this research that the quality of financial statements prepared in accordance with accounting standards and government agencies use the accounting system through the integrated application system. These quality of financial statements present the financial information is relevant, reliable, comparable and understandable making it useful as a basis for decision making, and can be used as a reference for the work units in the area KPU NTB to achieve WTP opinion of BPK.

Keywords: *good governance; government accounting standards; agency accounting system; quality of financial statements.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di NTB. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah entitas sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota/staf yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 100 responden. Pengolahan data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan analisis data menggunakan *second order confirmatory*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi instansi, tetapi tidak dipengaruhi oleh penerapan *good governance*. Implikasi dari penelitian ini bahwa kualitas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah melalui sistem aplikasi terintegrasi. Kualitas laporan keuangan ini menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan serta dapat dijadikan acuan bagi satuan kerja di lingkungan KPU NTB untuk memperoleh opini WTP BPK.

Kata Kunci: *good governance; standar akuntansi pemerintahan; sistem akuntansi instansi; kualitas laporan keuangan*

¹ Penulis koresponden. roisatulaminy@gmail.com

PENDAHULUAN

Paket regulasi di bidang keuangan negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fenomena yang terjadi selama lima tahun terakhir (2010-2014), bahwa BPK selalu memberikan opini WDP atas laporan keuangan KPU. Opini yang diberikan oleh BPK bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Demikian pula dengan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI Perwakilan Provinsi NTB dengan LHP Nomor 39/LHP/XIX.MTR/11/2014 tanggal 20 November 2014, menemukan beberapa permasalahan antara lain sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan belum efektif dalam mendeteksi terjadinya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban belanja pelaksanaan anggaran belanja barang tidak sesuai ketentuan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, menghadapi tantangan dengan diselenggarakannya kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada tahun 2015, KPU NTB menyelenggarakan pilkada serentak meliputi 7 KPU Kabupaten/Kota, yakni KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Tengah, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Dompu, dan KPU Kabupaten Bima. Pemberian dana hibah pilkada berimplikasi pada penatausahaan keuangan satuan kerja dan mempengaruhi pencatatan laporan keuangan.

Merujuk hal di atas, pengelolaan keuangan negara harus sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, dimana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan harus diterapkan tata kelola keuangan dengan baik dan benar. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara (*state*), sektor swasta, dan masyarakat (*society*) (LAN RI, 2004:25). Menurut Santosa (2012:130) menyebutkan bahwa syarat bagi terciptanya *good governance* yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang partisipatif. Adanya *rule of law* sebagai karakteristik pemerintahan yang baik, memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2012:7). Hasil penelitian Zeyn (2011) dan Azlim *et al.* (2012) membuktikan bahwa penerapan *good governance* mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dimana penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dijadikan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP mewajibkan setiap entitas akuntansi dan pelaporan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Dalam teori *decision usefulness* menggunakan dua perspektif, yaitu perspektif informasi dan perspektif pengukuran. Perspektif informasi lebih menekankan pada kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan, sedangkan perspektif pengukuran menekankan pada pemilihan metode pengukuran terhadap laporan keuangan (Scott, 2003). Berdasarkan perspektif informasi, laporan keuangan memberikan informasi akuntansi yang menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan berdasarkan perspektif pengukuran, PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyajian laporan keuangan dengan memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sehingga dapat memenuhi tujuannya, yakni menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008), Irwan (2011), Zeyn (2011), Azlim *et al.* (2012), Juwita (2013), Adhi dan

Suhardjo (2013), menunjukkan bukti bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Sari *et al.* (2014) dan (2015) menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai SAP merupakan faktor yang efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI). SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga (PMK No.213/PMK.05/2013). SAI menghasilkan laporan keuangan melalui sistem aplikasi terintegrasi, yaitu Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAKBMN. Penerapan SAI diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya membantu dalam proses pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil penelitian Hazrita *et al.* (2014) dan Perdanawati (2014), dan Juwita (2013) membuktikan bahwa SAI berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komponen-komponen dalam SAI yang digunakan sebagian besar telah menunjukkan kualitas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sangat membantu dan sangat memadai sehingga dapat mendukung laporan keuangan yang disajikan.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Disamping itu, pada penelitian sebelumnya, variabel *good governance*, SAP dan SAI terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan masing-masing secara terpisah, sedangkan dalam penelitian ini ketiga variabel di atas digabungkan secara bersama-sama menjadi pengaruh penerapan *good governance*, SAP dan SAI terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, populasi serta alat analisis yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan referensi penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Se-NTB
- H₂ : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Se-NTB
- H₃ : Penerapan sistem akuntansi instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Se-NTB

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja pada KPU se-NTB, terdiri dari satu KPU Provinsi dan sepuluh KPU Kabupaten/Kota, sehingga penelitian ini disebut penelitian sensus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah entitas, karena yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah hasil akhir dari sebuah proses informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja sebagai entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas yang dipilih adalah seluruh aparat yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja KPU Se-NTB yang berjumlah 100 responden, terdiri atas 11 KPA, 11 PPK, 11 Bendahara Pengeluaran, dan 67 staf subbagian umum/keuangan dalam wilayah KPU se-NTB.

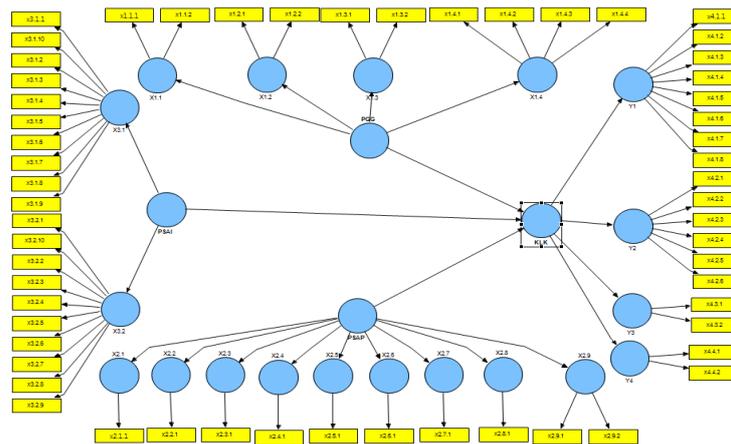
Penelitian ini terdiri atas tiga variabel eksogen, yaitu penerapan *good governance*, penerapan SAP, dan penerapan SAI, serta satu variabel endogen, yaitu kualitas laporan keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penerapan *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara (*state*), sektor swasta, dan masyarakat (*society*)

(LAN RI, 2004:25). Dimensi yang digunakan adalah (a) dimensi partisipasi, diukur dengan keterbukaan dan kemudahan akses; (b) dimensi transparansi, diukur dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan keterlibatan menyusun laporan keuangan; (c) dimensi akuntabilitas, diukur dengan pertanggungjawaban dan pelaporan secara periodik; dan (d) dimensi aturan hukum (*rule of law*), diukur dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kesadaran dan kepatuhan, adanya *reward and punishment*, serta pelaksanaan *reward and punishment* yang adil. Kuisisioner terdiri atas 10 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Zeyn (2011) dan definisi operasional variabel, serta menggunakan skala *likert* empat.

- 2) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Dimensi yang digunakan untuk variabel SAP adalah (a) basis akuntansi, (b) prinsip nilai historis, (c) prinsip realisasi, (d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal, (e) prinsip periodisitas, (f) prinsip konsistensi, (g) prinsip pengungkapan lengkap, (h) prinsip penyajian wajar, dan (i) pemeriksaan oleh BPK. Penambahan dimensi pemeriksaan oleh BPK adalah untuk mengetahui sikap responden atas opini yang diberikan oleh BPK. Kuisisioner untuk variabel ini terdiri atas 10 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Roni (2015).
- 3) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga (PMK No.213/PMK.05/2013). Dimensi yang digunakan adalah (a) penggunaan aplikasi SAIBA, dan (b) penggunaan aplikasi SIMAKBMN. Masing-masing dimensi diukur dengan 10 indikator, yaitu menjamin harta kekayaan satker, kelengkapan informasi keuangan/barang yang dihasilkan, menyediakan data keuangan/barang untuk kepentingan audit, menyediakan data keuangan/barang untuk penyusunan dan evaluasi anggaran, pencatatan data keuangan/barang, akurasi data keuangan/barang, rekonsiliasi data keuangan/barang, pelaporan keuangan/barang secara periodik, pengoperasian Aplikasi SAIBA/SIMAKBMN, dan keamanan data keuangan/barang. Kuisisioner untuk variabel ini terdiri atas 20 item pernyataan.
- 4) Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No 71 Tahun 2010). Prasyarat normatif yang dimaksudkan tidak terlepas dari empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dimensi yang digunakan adalah (a) relevan, diukur dengan melihat manfaat informasi yang dihasilkan memberikan informasi keuangan di masa kini, mengoreksi keputusan di masa lalu, memprediksi aktifitas keuangan di masa datang, bermanfaat dalam pengambilan keputusan, tepat waktu, sesuai periode pelaporan, penyajian komponen pokok laporan keuangan, dan disajikan secara lengkap; (b) andal, diukur dengan melihat informasi disajikan secara jujur, disajikan secara wajar, dapat diverifikasi, dapat diuji oleh pihak lain, tidak memihak, dan ditujukan untuk kepentingan umum; (c) dapat dibandingkan, diukur dengan melihat informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan entitas lain; dan (d) dapat dipahami, diukur dengan melihat informasi yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna. Kuisisioner untuk variabel ini terdiri atas 18 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Irwan (2011) dan Roni (2015).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *second order confirmatory factor analysis* dengan bantuan program SmartPLS versi 2.0. Model struktural penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Ilustrasi Model Struktur Awal dengan PLS

Persamaan model struktural penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KLK = \gamma_1 PGG + \gamma_2 PSAP + \gamma_3 PSAI + \zeta$$

Keterangan:

PGG : Penerapan *Good Governance*

PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAI : Penerapan Sistem Akuntansi Instansi

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

γ (Gama) : Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel laten endogen

ζ (Zeta) : Galat model struktural

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability* untuk blok indikatornya (Ghozali dan Latan, 2012:77). Hasil evaluasi *outer model* tahap I untuk *first order* adalah masih terdapat 10 indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,5 dan harus di drop dari model karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen, yaitu indikator X1.2.2 (0,483), X1.3.2 (0,447), X2.2.1 (0,407), X2.3.1 (0,377), X3.1.6 (0,451), X3.2.4 (0,353), X3.2.6 (0,462), X3.2.9 (0,471), X4.1.6 (0,422); dan X4.2.3 (0,425). Sepuluh indikator tersebut didrop dari model, dan kemudian dilakukan pengujian ulang. Hasil evaluasi *outer model* tahap II menunjukkan bahwa masih terdapat *loading factor* dibawah 0,5, yaitu indikator X1.1.1 dan X3.1.9 (0,470). Kedua indikator tersebut didrop dari model, dan dilakukan pengujian ulang kembali. Hasil evaluasi *outer model* tahap III menunjukkan bahwa semua *loading factor* untuk *first order* dan *second order* baik dari dimensi ke indikator, maupun dari variabel ke dimensi menghasilkan nilai *loading faktor* > 0.5. Artinya bahwa indikator konstruk adalah valid dan memenuhi syarat *validitas convergen*.

Selanjutnya uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel. Hasil evaluasi *outer model* tahap III pada tabel *cross loading* menunjukkan bahwa nilai korelasi setiap konstruk dengan masing-masing indikator pengukurannya lebih besar daripada nilai korelasi konstruk dengan indikator lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik daripada indikator pada blok lainnya, sehingga memenuhi persyaratan *discriminant validity*.

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali dan Latan, 2012:79). Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Rule of Thumb* nilai alpha atau *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair *et al.*, 2008 dalam

Abdillah dan Jogiyanto, 2015:196). Tabel 1 berikut ini menyajikan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.

Tabel 1. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Dimensi	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	0,909435	0,893224
Relevan (Y ₁)	0,844127	0,785685
Andal (Y ₂)	0,860029	0,796337
Dapat Dibandingkan (Y ₃)	0,880556	0,728719
Dapat Dipahami (Y ₄)	0,830335	0,592451
Variabel Penerapan Good Governance (PGG)	0,825674	0,753052
Transparansi (X _{1.1})	1,000000	1,000000
Partisipasi (X _{1.2})	1,000000	1,000000
Akuntabilitas (X _{1.3})	1,000000	1,000000
<i>Rule of Law</i> (X _{1.4})	0,807846	0,682763
Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)	0,873033	0,832232
Basis Akuntansi (X _{2.1})	1,000000	1,000000
Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (X _{2.4})	1,000000	1,000000
Prinsip Periodisitas (X _{2.5})	1,000000	1,000000
Prinsip Konsistensi (X _{2.6})	1,000000	1,000000
Prinsip Pengungkapan Lengkap (X _{2.7})	1,000000	1,000000
Prinsip Penyajian Wajar (X _{2.8})	1,000000	1,000000
Pemeriksaan oleh BPK (X _{2.9})	0,898525	0,775272
Variabel Penerapan Sistem Akuntansi instansi (PSAI)	0,926225	0,914279
Penggunaan Aplikasi SAIBA (X _{3.1})	0,890483	0,858578
Penggunaan Aplikasi SIMAKBMN (X _{3.2})	0,886864	0,850109

Sumber : *Output PLS Algorithm*

Penelitian ini menggunakan *second order construct*, sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan *bootstrapping* untuk melihat signifikansi dalam nilai T-statistik pada tabel *outer loadings*. Kriterianya adalah T-statistic > 1,96 (nilai alpha 5%, *two tail*). Berdasarkan kalkulasi akhir PLS pada menu *bootstrapping*, nilai *T-statistics* pada tabel *outer loadings* menunjukkan bahwa nilai T-statistic > 1,96 yang berarti bahwa semua *first order* signifikan atau valid. Nilai *T-statistics* pada tabel *path coefficients* juga menunjukkan angka > 1,96. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua *second order construct* atau konstruk variabel dapat dibentuk oleh masing-masing *first order construct*.

Evaluasi *inner model* (model struktural) bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan melihat nilai *R-square* untuk konstruk laten endogen, *predictive relevance (Q Square)* untuk mengetahui kapabilitas dengan prosedur *blindfolding*, dan nilai *T-statistics* pada tabel *path coefficients* untuk uji signifikansi melalui menu *bootstrapping*.

Nilai *R-square* yang dihasilkan dari evaluasi *inner model* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Nilai R-Square

Konstruk	R Square
KLK	0,653223

Sumber : *Output PLS Algorithm*

Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa nilai *R Square* untuk konstruk laten KLK (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar 0,6532. Hal ini berarti bahwa konstruk laten KLK dapat di terangkan oleh konstruk variabel PGG, PSAI, dan PSAP sebesar 65,32%, (kuat) sementara 34,68% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya Q^2 *predictive relevance* dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2) = 1 - (1 - 0,653223) = 0,653223$$

Hasil perhitungan dengan Q^2 *predictive relevance* di atas konsisten dengan nilai *R-Square* yakni sebesar 0,653223. Hal ini berarti bahwa model memiliki *predictive relevance* yang kuat karena $Q^2 > 0,35$. Selain *R-Square* dan *Q Square*, evaluasi *inner model* melalui menu *bootstrapping* juga menghasilkan Nilai *T-statistics* yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil nilai *T-statistics* pada tabel *path coefficients* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Path Coefficients

	Original Sample (O)	T Statistics ((O/STERR))	Hipotesis	Keterangan
PGG -> KLK	0,119345	1,032149	H1	Ditolak
PSAP -> KLK	0,352235	2,462795	H2	Diterima
PSAI -> KLK	0,427907	3,015738	H3	Diterima

Sumber : *Output PLS Bootstrapping*

Persamaan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

$$KLK = 0,12PGG + 0,35PSAP + 0,43PSAI + \zeta$$

Keterangan:

- KLK = kualitas laporan keuangan
 PGG = penerapan *good governance*
 PSAP = penerapan standar akuntansi pemerintahan
 PSAI = penerapan sistem akuntansi instansi
 ζ (Zeta) = galat model struktural

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis 1 (H_1) menunjukkan nilai t-statistik $1,032 < 1,96$ (t-tabel) sehingga H_1 dalam penelitian ini ditolak dan memberikan bukti bahwa penerapan *good governance* tidak

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2012), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azlim *et al.* (2012) dan Zeyn (2011). Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan disebabkan karena prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada proses pengambilan keputusan, dimana belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, menyebabkan informasi keuangan yang disajikan tidak mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep *decision usefulness theory*.

Penolakan hipotesis H_1 , berasal dari dimensi partisipasi terutama dari indikator keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun dari sisi dimensi akuntabilitas, laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, namun pelaksanaan penyusunan laporan keuangan hanya dibebankan atau terpusat pada satu atau beberapa orang pegawai saja. Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan pimpinan yang hanya fokus pada hasil yang dikehendaki, yaitu prestasi yang efektif dalam penyusunan laporan keuangan. KPA sebagai pimpinan dan penanggungjawab utama atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan belum berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul dan melibatkan seluruh pegawai pada bagian umum/keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pegawai yang menurut persepsi pimpinan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai terus dibebankan tugas dan tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga peneliti menduga bahwa, pegawai yang tidak dilibatkan merasa tersisih dan menganggap dirinya tidak dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan.

Penyebab lain penolakan hipotesis H_1 berasal dari dimensi *rule of law*, terutama dari indikator pelaksanaan *reward and punishment* yang adil. Meskipun mayoritas responden menjawab setuju dengan adanya *reward and punishment*, namun dalam pelaksanaannya *reward and punishment* masih belum dilaksanakan dengan adil. Di dalam pelaksanaannya, belum ada sanksi maupun teguran (*punishment*) dari pimpinan atas setiap kesalahan maupun penghargaan (*reward*) atas prestasi yang dihasilkan pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menunjukkan nilai t-statistik $2,46 > 1,96$ (t-tabel) sehingga hipotesis H_2 di terima dan memberikan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik pengguna maupun penyusun laporan keuangan dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008), Irwan (2011), Zeyn (2011), Azlim *et al.* (2012), serta Adhi dan Suhardjo (2013) yang menyatakan bahwa bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Siahaan dan Fachruzamman (2013), dan Handayani (2012) yang menyatakan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep pendekatan kegunaan keputusan yang menggunakan 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif informasi yang lebih menekankan pada kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan dan persepektif pengukuran yang menekankan pada pemilihan metode pengukuran terhadap laporan keuangan (Scott, 2003). Laporan keuangan entitas yang disusun sesuai dengan prinsip dan standar yang digunakan dalam SAP akan menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengaruh Penerapan SAI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menunjukkan nilai t-statistik $3,02 > 1,96$ (t-tabel) sehingga hipotesis H_3 diterima dan memberikan bukti bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien parameter juga menunjukkan nilai positif $0,427907$. Hal ini mengindikasikan semakin baik sistem aplikasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan dan laporan barang yang akan dihasilkan. Laporan keuangan dihasilkan melalui Aplikasi SAIBA sedangkan laporan barang dihasilkan melalui Aplikasi SIMAKBMN. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hazrita *et al.* (2014), Perdanawati (2014), dan Juwita (2013), namun tidak selaras dengan hasil penelitian Siahaan dan Fachruzamman (2013).

Temuan ini mendukung teori kegunaan keputusan, yang menyatakan “Oleh sebab itu, merupakan suatu akibat yang wajar dari asumsi adanya manajemen yang rasional bahwa akan terdapat suatu sistem yang memberikan informasi” (Chambers, 1961 dalam Belkoui, 2012:55). Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui sistem informasi yang baik. Sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan komponen, baik manual ataupun berbasis komputer, yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemakai informasi tersebut (Diana dan Setiawati, 2011:4). KPU sebagai salah satu kementerian negara/lembaga juga menggunakan SAI yang dikembangkan oleh kementerian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAI melalui sistem aplikasi yang terintegrasi mampu menjamin akurasi data keuangan dan barang yang disajikan. Adanya rekonsiliasi data keuangan dan data barang membantu meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan data keuangan dan barang yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama dalam evaluasi dan penyusunan anggaran. Sistem aplikasi yang terintegrasi menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, dan dilaporkan secara periodik. Output dari sistem aplikasi berupa Neraca memberikan informasi tentang aset dan kewajiban, serta kas dan persediaan masing-masing satuan kerja. Hal ini berarti bahwa, sistem aplikasi yang digunakan mampu menyimpan data keuangan dan barang dengan baik, sehingga dapat menjamin harta/kekayaan yang dimiliki maupun kewajiban/hutang yang harus segera dipenuhi oleh satuan kerja. Komitmen pimpinan dan kualitas sumber daya yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN

Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan dengan maksimal pada satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan laporan keuangan tidak melibatkan seluruh pegawai pada bagian umum/keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan tidak berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul dari para pegawai. Demikian pula dengan pelaksanaan *reward and punishment* yang tidak adil menunjukkan prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan secara maksimal, sehingga tidak membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menemukan bukti adanya pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik dengan semakin baiknya pengguna maupun penyusun laporan keuangan dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan

PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat diperiksa oleh BPK. Mengingat KPU adalah penyelenggara Pemilu, sehingga kedepannya menjadi tantangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini menemukan bukti adanya pengaruh penerapan SAI terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem aplikasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dihasilkan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi, yaitu Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAKBMN. Dalam pelaksanaannya, kedua sistem aplikasi tersebut mampu menghasilkan data keuangan yang akurat, memberikan informasi tentang aset atau kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh satuan kerja, sebagai bahan untuk evaluasi dan penyusunan anggaran, dapat diakses dengan cepat dan akurat sehingga memudahkan dalam proses audit, yang pada akhirnya bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Sistem aplikasi yang digunakan bisa diperoleh dengan mudah melalui website perbendaharaan negara, sehingga manfaat yang dihasilkan dari suatu sistem yang digunakan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sistem tersebut.

Penelitian selanjutnya dapat menguji kembali penerapan *good governance* yang dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Misalnya sistem pengendalian intern, penatausahaan aset Pemilu, dan komitmen organisasional. Mengingat selama 5 tahun terakhir (2010-2014), KPU selalu mendapat opini WDP dari BPK, maka variabel opini BPK dapat dijadikan sebagai variabel intervening dalam penelitian selanjutnya. Disamping itu, penelitian mendatang dapat menggali lebih dalam tentang kompetensi aparatur dalam menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan, mengingat sistem akuntansi berbasis akrual sudah mulai diterapkan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik, dengan menambah wawasan dan referensi – referensi terkait penelitian sejenis. Seperti menambah dimensi dan indikator yang digunakan sebagai pengukur dimensi konstruk laten *good governance* dengan mengacu pada karakteristik *good governance* menurut UNDP. Yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*. Dengan demikian diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan obyek penelitian, yaitu pada seluruh KPU se-Indonesia agar dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto.2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Adhi, Daniel Kartika dan Suhardjo, Yohaner. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang. Vol 5. No.3. Edisi Oktober 2013. ISSN 2252-7826*.
- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Bada Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1. Nomor 1. Pp.1-14*.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. 5 Juni 2015. *BPK Temukan Empat Permasalahan Dalam LKPP Tahun 2014*. From <http://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-empat-permasalahan-dalam-lkpp-tahun-2014>. diakses tanggal 7 Juni 2015
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2014. Ringkasan Eksekutif*. From http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2014/lkpp_2014_1433386872.pdf. Diakses tanggal 7 Juni 2015.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi. Perancangan, Proses, dan Penerapan Anggaran*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2012. *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Desi. 2012. Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.5, Desember 2012, 12-16*.
- Hazrita, Fadilah, Rasuli, M dan Kamaliah. 2014. Pengaruh Kompetensi dan sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. *Jurnal SOROT Vol 9 No 1 April hal 1 – 121. Lembaga Penelitian Universitas Riau*.
<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4118/Tingkatkan-Kualitas-Laporan-Kuangan-KPU-Adakan-Rapat-Koordinasi>. Diakses tanggal 29 Desember 2015.
- Irwan, Deri. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Thesis.
- Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Triekonomika*. Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214. *ISSN 1411-514X*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Perdanawati, Luh Putu Virra Indah. 2014. Pengaruh Unsur-Unsur Kepuasan Pengguna Pada Efisiensi dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Di Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Di Provinsi Bali. *Tesis*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Roni, Muhammad. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Rekonsiliasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram). Thesis.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama- Bandung.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, Adiputra, I Made Pradana dan Sujana, Edy. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem informasi

- Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 Nomor 1*,
- Scott, W. R. 2003. *Financial Accounting Theory*, 2nd edition. Prentice Hall Canada Inc.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”. Bagian Kedua. Edisi Revisi. CV.Mandor Maju.Bandung.
- Siahaan, Moni Gusfin dan Fachruzamman. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang.
- Zeyn, Elvira., 2011. Pengaruh *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37.